



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari:
 - a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
 - (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 149.302.500.000.000,00.
 - (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 114.585.600.000.000,00.
 - (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 263.888.100.000.000,00."
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
 - a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 72.930.800.000.000,00;
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 49.711.400.000.000,00;
 - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 26.660.300.000.000,00;
 - (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
 - a. Bantuan program sebesar Rp 74.044.700.000.000,00
 - b. Bantuan proyek sebesar Rp 40.540.900.000.000,00."
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari:
 - a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.
 - (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 171.205.100.000.000,00.
 - (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 92.683.000.000.000,00.
 - (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 263.888.100.000.000,00."
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 5 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

- (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor:

| | | | |
|----|--|----|------------------------|
| 01 | Sektor industri sebesar | Rp | 83.385.209.000,00 |
| 02 | Sektor pertanian dan kehutanan sebesar | Rp | 627.724.191.000,00 |
| 03 | Sektor pengairan sebesar | Rp | 38.416.795.000,00 |
| 04 | Sektor tenaga kerja sebesar | Rp | 318.069.481.000,00 |
| 05 | Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar | Rp | 131.471.733.358.000,00 |
| 06 | Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar | Rp | 329.700.829.000,00 |
| 07 | Sektor pertambangan dan energi sebesar | Rp | 318.933.498.000,00 |
| 08 | Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar | Rp | 117.207.539.000,00 |
| 09 | Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar | Rp | 13.491.262.070.000,00 |
| 10 | Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar | Rp | 357.912.413.000,00 |
| 11 | Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap | | |

| | | | |
|----|--|----|----------------------|
| | Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar | Rp | 4.740.026.958.000,00 |
| 12 | Sektor kependudukan dan keluarga Sejahtera sebesar | Rp | 331.654.091.000,00 |
| 13 | Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar | Rp | 705.289.102.000,00 |
| 14 | Sektor perumahan dan permukiman sebesar | Rp | 22.813.072.000,00 |
| 15 | Sektor agama sebesar | Rp | 1.304.164.065.000,00 |
| 16 | Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar | Rp | 409.502.164.000,00 |
| 17 | Sektor hukum sebesar | Rp | 759.292.576.000,00 |
| 18 | Sektor aparaturnegara dan pengawasan sebesar | Rp | 5.241.341.916.000,00 |
| 19 | Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar | Rp | 2.918.502.598.000,00 |
| 20 | Sektor pertahanan dan keamanan sebesar | Rp | 7.618.168.075.000,00 |

(2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(3) pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor:

| | | | |
|----|--|----|-----------------------|
| 01 | Sektor industri sebesar | Rp | 788.182.000.000,00 |
| 02 | Sektor pertanian dan kehutanan sebesar | Rp | 7.484.649.000.000,00 |
| 03 | Sektor pengairan sebesar | Rp | 4.774.718.000.000,00 |
| 04 | Sektor tenaga kerja sebesar | Rp | 1.304.906.300.000,00 |
| 05 | Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar | Rp | 16.687.632.000.000,00 |
| 06 | Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar | Rp | 9.642.565.000.000,00 |
| 07 | Sektor pertambangan dan energi sebesar | Rp | 7.059.462.100.000,00 |
| 08 | Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar | Rp | 1.181.041.000.000,00 |
| 09 | Sektor pembangunan daerah | | |

| | | | |
|-----|--|----|-----------------------|
| | dan transmigrasi sebesar | Rp | 19.091.631.300.000,00 |
| 10 | Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar | Rp | 779.998.600.000,00 |
| 11 | Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar | Rp | 8.367.581.600.000,00 |
| 12 | Sektor kependudukan dan keluarga Sejahtera sebesar | Rp | 582.280.400.000,00 |
| 13 | Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar | Rp | 4.204.762.300.000,00 |
| 14 | Sektor perumahan dan permukiman sebesar | Rp | 5.615.182.600.000,00 |
| 15 | Sektor agama sebesar | Rp | 475.942.000.000,00 |
| 16 | Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar | Rp | 1.144.019.300.000,00 |
| 17 | Sektor hukum sebesar | Rp | 167.038.900.000,00 |
| 18 | Sektor aparaturnegara dan pengawasan sebesar | Rp | 786.810.500.000,00 |
| 19 | Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar | Rp | 421.780.400.000,00 |
| 20 | Sektor pertahanan dan keamanan sebesar | Rp | 2.122.816.700.000,00 |
| (4) | Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini." | | |

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 175

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

UMUM

Semenjak disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 telah terjadi perubahan yang sangat mendasar pada kondisi perekonomian nasional. Perubahan mendasar tersebut ditandai oleh adanya beberapa perkembangan yang kurang menguntungkan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, meningkatnya angka inflasi, dan menurunnya harga minyak bumi, telah memberikan dampak negatif yang sangat dalam terhadap kemerosotan kegiatan perekonomian nasional. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran berjalan, terutama terhadap beberapa pos pendapatan dan belanja negara yang berkaitan dengan perubahan berbagai faktor eksternal. Berkaitan dengan hal itu, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999. Perubahan tersebut dimaksudkan agar sasaran anggaran pendapatan dan belanja negara lebih wajar sejalan dengan perkembangan dan perubahan keadaan, serta mendukung program reformasi ekonomi, khususnya di bidang fiskal. Selain itu, perubahan tersebut juga merupakan upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat di dalam dan di luar negeri terhadap perekonomian nasional, sehingga upaya pemulihan kondisi perekonomian dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

"Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas"

Angka 2
 Cukup jelas
 "Pasal 3
 Ayat (1)

(dalam rupiah)

Penerimaan per pajakan sebesar 72.930.800.000.000,00
 terdiri dari:

| | | |
|----------------------|--|-----------------------|
| 0110 | Pajak penghasilan (PPh) | 25.846.200.000.000,00 |
| 0120 | Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPn BM) | 28.940.000.000.000,00 |
| 0140 | Pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB) | 3.411.000.000.000,00 |
| 0210 | Bea masuk | |
| 5.494.900.000.000,00 | | |
| 0220 | Cukai | 7.755.900.000.000,00 |
| 0230 | Pungutan (pajak) ekspor | 942.800.000.000,00 |
| 0240 | Bea meterai | 540.000.000.000,00 |

Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar
 terdiri dari :

49.711.400.000.000,00

| | | |
|------|------------------------|-----------------------|
| 0310 | Penerimaan minyak bumi | 32.908.600.000.000,00 |
| 0320 | Penerimaan gas alam | 16.802.800.000.000,00 |

Penerimaan negara bukan pajak sebesar 26.660.300.000.000,00
 terdiri dari :

| | | |
|------|--|--------------------|
| 0410 | Pendapatan pendidikan | 94.675.400.000,00 |
| 0411 | Uang pendidikan | 93.960.200.000,00 |
| 0412 | Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan | 715.200.000,00 |
| 0480 | Pendapatan pendidikan swadana | 503.103.900.000,00 |

| | | |
|------|--|--------------------|
| 0481 | Pendapatan pendidikan swadana | 503.103.900.000,00 |
| 0510 | Penjualan hasil produksi, sitaan | 23.145.300.000,00 |
| 0511 | Penjualan hasil pertanian, perkebunan | 1.221.500.000,00 |
| 0512 | Penjualan hasil perternakan | 10.479.400.000,00 |
| 0513 | Penjualan hasil perikanan | 811.700.000,00 |
| 0514 | Penjualan hasil sitaan | 3.000.000.000,00 |
| 0515 | Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi | 129.000.000,00 |
| 0516 | Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya | 617.900.000,00 |
| 0517 | Penjualan dokumen-dokumen pelelangan | 6.342.100.000,00 |
| 0519 | Penjualan lainnya | 543.700.000,00 |
| 0520 | Penjualan aset tetap | 14.626.200.000,00 |
| 0521 | Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah | 720.800.000,00 |
| 0522 | Penjualan kendaraan bermotor | 166.500.000,00 |
| 0523 | Penjualan sewa beli | 12.500.100.000,00 |
| 0529 | Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan | 1.238.800.000,00 |
| 0530 | Pendapatan sewa | 9.561.700.000,00 |
| 0531 | Sewa rumah dinas, rumah negeri | 4.219.600.000,00 |
| 0532 | Sewa gedung, bangunan, gudang | 1.827.900.000,00 |
| 0533 | Sewa benda-benda bergerak | 2.837.800.000,00 |
| 0539 | Sewa benda-benda tak bergerak lainnya | 676.400.000,00 |
| 0540 | Pendapatan jasa I | 507.557.500.000,00 |
| 0541 | Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya | 8.975.000.000,00 |
| 0542 | Pendapatan tempat hiburan, taman, museum | 241.000.000,00 |
| 0543 | Pendapatan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, STNK, BPKB | 135.800.000.000,00 |
| 0544 | pendapatan jasa pertanahan | 77.854.000.000,00 |
| 0545 | Pendapatan hak dan perijinan | 236.725.200.000,00 |
| 0546 | Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan | 7.017.800.000,00 |
| 0547 | Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan | 4.652.600.000,00 |
| 0548 | Pendapatan jasa kantor urusan | |

| | | |
|------|--|----------------------|
| | agama | 6.000.000.000,00 |
| 0549 | Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan | 30.291.900.000,00 |
| 0550 | Pendapatan jasa II | 324.982.200.000,00 |
| 0551 | Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) | 31.189.500.000,00 |
| 0552 | Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda | 170.714.000.000,00 |
| 0553 | Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin | 2.500.000.000,00 |
| 0554 | Pendapatan jasa Kantor Catatan Sipil | 11.765.000.000,00 |
| 0555 | Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa | 1.751.000.000,00 |
| 0556 | Pendapatan uang pewarganegaraan | 250.000.000,00 |
| 0557 | Bea lelang | 32.000.000.000,00 |
| 0558 | Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara | 50.000.000.000,00 |
| 0559 | Pendapatan jasa lainnya | 24.812.700.000,00 |
| 0560 | Pendapatan rutin dari luar negeri | 19.500.000.000,00 |
| 0561 | Bea visa dan paspor | 4.000.000.000,00 |
| 0562 | Bea konsuler | 4.000.000.000,00 |
| 0569 | Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri | 11.500.000.000,00 |
| 0580 | Pendapatan Penjualan, Sewa dan Jasa Swadana | 1.837.896.100.000,00 |
| 0581 | Pendapatan penjualan swadana | 11.393.100.000,00 |
| 0582 | Pendapatan sewa swadana | 1.634.400.000,00 |
| 0583 | Pendapat jasa swadana | 1.824.868.600.000,00 |
| 0610 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan | 20.355.000.000,00 |
| 0611 | Legilisasi tanda tangan | 80.000.000,00 |
| 0612 | Pengesahan surat di bawah tangan | 50.000.000,00 |
| 0613 | Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan | 2.075.000.000,00 |
| 0614 | Hasil denda, denda tilang dan sebagainya | 11.700.000.000,00 |
| 0615 | Ongkos perkara | 1.250.000.000,00 |
| 0619 | Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya | 5.200.000.000,00 |

| | | |
|------|--|-----------------------|
| 0710 | Pendapatan dari investasi | 6.828.080.000.000,00 |
| 0711 | Bagian laba dari BUMN | 4.000.000.000.000,00 |
| 0713 | Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman) | 2.828.080.000.000,00 |
| 0810 | Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan | 36.691.900.000,00 |
| 0811 | Penerimaan kembali belanja pegawai pusat | 1.227.100.000,00 |
| 0812 | Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom | 3.000.000.000,00 |
| 0813 | Penerimaan kembali belanja pensiun | 2.000.000.000,00 |
| 0814 | Penerimaan kembali belanja rutin lainnya | 30.095.300.000,00 |
| 0815 | Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya | 369.500.000,00 |
| 0820 | Pendapatan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang lalu | 2.739.300.000,00 |
| 0821 | Penerimaan kembali belanja pegawai pusat | 1.288.600.000,00 |
| 0824 | Penerimaan kembali belanja rutin lainnya | 215.500.000,00 |
| 0825 | Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya | 1.235.200.000,00 |
| 0880 | Pendapatan lain-lain Swadana | 5.000.000.000,00 |
| 0881 | Pendapat lain-lain swadana | 5.000.000.000,00 |
| 0890 | Pendapatan lain-lain | 16.432.385.500.000,00 |
| 0891 | Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji | 836.400.000,00 |
| 0892 | Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan | 2.527.300.000,00 |
| 0893 | Penerimaan kembali, ganti rugi | 1.626.400.000,00 |
| 0894 | Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPN | 200.000.000.000,00 |
| 0895 | Penerimaan hasil penjualan saham Pemerintah pada BUMN | 15.000.000.000.000,00 |
| 0899 | Pendapat anggaran lainnya | 1.227.395.400.000,00 |

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas"

Angka 3
Cukup jelas
"Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas"

Angka 4
Cukup jelas
"Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

(dalam rupiah)

Pengeluaran rutin sebesar 171.205.100.000.000,00
terdiri dari :

| | | |
|------|--|--------------------|
| 01 | SEKTOR INDUSTRI | 83.385.209.000,00 |
| 01.1 | Subsektor Industri | 83.385.209.000,00 |
| 02 | SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN | 627.724.191.000,00 |
| 02.1 | Subsektor Pertanian | 207.325.806.000,00 |
| 02.2 | Subsektor Kehutanan | 420.398.385.000,00 |
| 03 | SEKTOR PENGAIRAN | 38.416.795.000,00 |
| 03.1 | Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air | 20.107.020.000,00 |
| 03.2 | Subsektor Irigasi | 18.309.775.000,00 |
| 04 | SEKTOR TENAGA KERJA | 318.069.481.000,00 |
| 04.1 | Subsektor Tenaga Kerja | 318.069.481.000,00 |

| | | |
|------|--|------------------------|
| 05 | SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI | 1.471.733.358.000,00 |
| 05.1 | Subsektor Perdagangan Dalam Negeri | 79.508.368.000,00 |
| 05.2 | Subsektor Perdagangan Luar Negeri | 77.169.654.000,00 |
| 05.4 | Subsektor Keuangan | 131.214.089.512.000,00 |
| 05.5 | Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil | 100.965.824.000,00 |
| 06 | SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA | 329.700.829.000,00 |
| 06.1 | Subsektor Prasarana Jalan | 33.304.583.000,00 |
| 06.2 | Subsektor Transportasi Darat | 28.587.635.000,00 |
| 06.3 | Subsektor Transportasi Laut | 148.476.497.000,00 |
| 06.4 | Subsektor Transportasi Udara | 64.155.748.000,00 |
| 06.5 | Subsektor Meteorologi, Geofisika Pencarian dan Penyelamatan (SAR) | 55.176.366.000,00 |
| 07 | SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI | 318.933.498.000,00 |
| 07.1 | Subsektor Pertambangan | 3138.506.408.000,00 |
| 07.2 | Subsektor Energi | 5.427.090.000,00 |
| 08 | SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI | 117.207.539.000,00 |
| 08.1 | Subsektor Pariwisata | 21.511.157.000,00 |
| 08.2 | Subsektor Pos dan Telekomunikasi | 95.696.382.000,00 |
| 09 | SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI | 13.491.262.070.000,00 |
| 09.1 | Subsektor Pembangunan Daerah | 13.408.846.551.000,00 |
| 09.2 | Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan | 82.415.519.000,00 |
| 10 | SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG | 357.912.413.000,00 |
| 10.1 | Subsektor Lingkungan Hidup | 9.456.675.000,00 |
| 10.2 | Subsektor Tata Ruang | 348.455.738.000,00 |
| 11 | SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 4.740.026.958.000,00 |
| 11.1 | Subsektor Pendidikan | 4.253.886.891.000,00 |
| 11.2 | Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan | 370.137.314.000,00 |
| 11.3 | Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa | 104.132.579.000,00 |
| 11.4 | Subsektor Pemuda dan Olah Raga | 11.870.174.000,00 |

| | | |
|------|--|----------------------|
| 12 | SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA | 331.654.091.000,00 |
| 12.1 | Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana | 331.654.091.000,00 |
| 13 | SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN | |
| | PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA | 705.289.102.000,00 |
| 13.1 | Subsektor Kesejahteraan Sosial | 137.509.102.000,00 |
| 13.2 | Subsektor Kesehatan | 567.780.000.000,00 |
| 14 | SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 22.813.072.000,00 |
| 14.1 | Subsektor Perumahan dan Permukiman | 15.847.769.000,00 |
| 14.2 | Subsektor Penataan Kota dan Bangunan | 6.965.303.000,00 |
| 15 | SEKTOR AGAMA | 1.304.164.065.000,00 |
| 15.1 | Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama | 200.879.140.000,00 |
| 15.2 | Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama | 1.103.284.925.000,00 |
| 16 | SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI | 409.502.164.000,00 |
| 16.2 | Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar | 263.877.083.000,00 |
| 16.3 | Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 39.595.541.000,00 |
| 16.5 | Subsektor Kedingrintaraan | 2.570.420.000,00 |
| 16.6 | Subsektor Sistem Informasi dan Statistik | 103.459.120.000,00 |
| 17 | SEKTOR HUKUM | 759.292.576.000,00 |
| 17.1 | Subsektor Pembinaan Hukum Nasional | 667.250.118.000,00 |
| 17.2 | Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum | 92.042.458.000,00 |
| 18 | SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN | 5.241.341.916.000,00 |
| 18.1 | Subsektor Aparatur Negara | 4.919.756.284.000,00 |
| 18.2 | Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan | 321.585.632.000,00 |
| 19 | SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA | 2.918.502.598.000,00 |
| 19.1 | Subsektor Politik | 105.010.313.000,00 |
| 19.2 | Subsektor Hubungan Luar Negeri | 2.264.656.197.000,00 |
| 19.3 | Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa | 548.836.088.000,00 |
| 20 | SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN | 7.618.168.075.000,00 |
| 20.2 | Subsektor Angkatan Bersenjata | |

| | | |
|------|---------------------|----------------------|
| 20.3 | Republik Indonesia | 7.245.321.188.000,00 |
| | Subsektor Pendukung | 372.846.887.000,00 |

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

(dalam rupiah)

Pengeluaran pembangunan sebesar 92.683.000.000.000,00

terdiri dari :

| | Nilai Rupiah | Bantuan Proyek dan Kredit Ekspor | Jumlah Rupiah |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 01 SEKTOR INDUSTRI | 147.810.000.000,00 | 640.372.000.000,00 | 788.182.000.000,00 |
| 01.1 Subsektor Industri | 147.810.000.000,00 | 640.372.000.000,00 | 788.182.000.000,00 |
| 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN | 5.450.126.000.000,00 | 2.034.523.000.000,00 | 7.484.649.000.000,00 |
| 02.1 Subsektor Pertanian | 4.937.116.000.000,00 | 1.978.500.000.000,00 | 6.915.616.000.000,00 |
| 02.2 Subsektor Kehutanan | 513.010.000.000,00 | 56.023.000.000,00 | 569.033.000.000,00 |
| 03 SEKTOR PENGAIRAN | 1.254.904.000.000,00 | 3.519.814.000.000,00 | 4.774.718.000.000,00 |
| 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air | 237.705.000.000,00 | 1.619.883.000.000,00 | 1.857.588.000.000,00 |
| 03.2 Subsektor Irigasi | 1.017.199.000.000,00 | 1.899.931.000.000,00 | 2.917.130.000.000,00 |
| 04 SEKTOR TENAGA KERJA | 1.118.714.300.000,00 | 186.192.000.000,00 | 1.304.906.300.000,00 |
| 04.1 Subsektor Tenaga Kerja | 1.118.714.300.000,00 | 186.192.000.000,00 | 1.304.906.300.000,00 |
| 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI | 15.811.024.000.000,00 | 876.608.000.000,00 | 16.687.632.000.000,00 |
| 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri | 25.500.000.000,00 | 22.012.000.000,00 | 47.512.000.000,00 |
| 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri | 52.915.000.000,00 | 200.406.000.000,00 | 253.321.000.000,00 |

| | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional | 5.432.000.000,00 | 64.475.000.000,00 | 69.907.000.000,00 |
| 05.4 Subsektor Keuangan | 15.005.882.000.000,00 | 429.652.000.000,00 | 15.435.000.000,00 |
| 05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil | 721.295.000.000,00 | 160.063.000.000,00 | 881.358.000.000,00 |
| 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA | 3.411.962.000.000,00 | 6.230.603.000.000,00 | 9.642.565.000.000,00 |
| 06.1 Subsektor Prasarana Jalan | 2.795.137.000.000,00 | 3.440.073.000.000,00 | 6.235.210.000.000,00 |
| 06.2 Subsektor Transportasi Darat | 246.580.000.000,00 | 1.199.783.000.000,00 | 1.446.363.000.000,00 |
| 06.3 Subsektor Transportasi Laut | 165.571.000.000,00 | 789.732.000.000,00 | 955.303.000.000,00 |
| 06.4 Subsektor Transportasi Udara | 189.200.000.000,00 | 760.198.000.000,00 | 949.398.000.000,00 |
| 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika Pencarian dan Penyelamatan (SAR) | 15.474.000.000,00 | 40.817.000.000,00 | 56.291.000.000,00 |
| 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI | 783.326.700.000,00 | 6.276.135.400.000,00 | 7.059.462.100.000,00 |
| 07.1 Subsektor Pertambangan | 50.981.300.000,00 | 0 | 50.981.300.000,00 |
| 07.2 Subsektor Energi | 732.345.400.000,00 | 6.276.135.400.000,00 | 7.008.480.800.000,00 |
| 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI | 75.910.000.000,00 | 1.105.131.000.000,00 | 1.181.041.000.000,00 |
| 08.1 Subsektor Pariwisata | 50.710.000.000,00 | 42.887.000.000,00 | 93.597.000.000,00 |
| 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi | 25.200.000.000,00 | 1.062.244.000.000,00 | 1.087.444.000.000,00 |
| 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI | 9.926.402.400.000,00 | 9.165.228.900.000,00 | 19.091.631.300.000,00 |
| 09.1 Subsektor Pembangunan Daerah | 9.045.111.100.000,00 | 9.140.944.900.000,00 | 18.186.056.000.000,00 |

| | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan | 881.291.300.000,00 | 24.284.000.000,00 | 905.575.300.000,00 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP
DAN TATA RUANG

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 330.294.600.000,00 | 449.704.000.000,00 | 779.998.600.000,00 |
| 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup | 270.112.600.000,00 | 309.601.000.000,00 | 579.713.600.000,00 |
| 10.2 Subsektor Tata Ruang | 60.182.000.000,00 | 140.103.000.000,00 | 200.285.000.000,00 |

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA PEMUDA DAN
OLAH RAGA

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 4.845.094.600.000,00 | 3.522.487.000.000,00 | 8.367.581.600.000,00 |
| 11.1 Subsektor Pendidikan | 4.514.752.000.000,00 | 3.260.350.000.000,00 | 7.775.102.000.000,00 |
| 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan | 185.257.400.000,00 | 220.166.000.000,00 | 405.423.400.000,00 |
| 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa | 74.616.800.000,00 | 25.732.000.000,00 | 100.348.800.000,00 |
| 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga | 70.468.400.000,00 | 16.239.000.000,00 | 86.707.400.000,00 |

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| SEJAHTERA | 242.692.400.000,00 | 339.588.000.000,00 | 582.280.400.000,00 |
| 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana | 242.692.400.000,00 | 339.588.000.000,00 | 582.280.400.000,00 |

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK
DAN REMAJA

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2.590.970.300.000,00 | 1.613.792.000.000,00 | 4.204.762.300.000,00 |
| 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial | 168.228.800.000,00 | 425.619.000.000,00 | 593.847.800.000,00 |
| 13.2 Subsektor Kesehatan | 1.998.046.300.000,00 | 1.170.199.000.000,00 | 3.168.245.300.000,00 |
| 13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja | 424.695.200.000,00 | 17.974.000.000,00 | 442.669.200.000,00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 3.615.442.600.000,00 | 1.999.740.000.000,00 | 5.615.182.600.000,00 |
| 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman | 3.604.037.600.000,00 | 1.799.504.000.000,00 | 5.403.541.600.000,00 |
| 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan | 11.405.000.000,00 | 200.236.000.000,00 | 211.641.000.000,00 |
| 15 SEKTOR AGAMA | 255.718.000.000,00 | 220.224.000.000,00 | 475.942.000.000,00 |
| 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama | 26.450.000.000,00 | 0 | 26.450.000.000,00 |
| 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama | 229.268.000.000,00 | 220.224.000.000,00 | 449.492.000.000,00 |
| 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI | 462.851.300.000,00 | 681.168.000.000,00 | 1.144.019.300.000,00 |
| 16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi | 143.751.300.000,00 | 135.943.000.000,00 | 279.694.300.000,00 |
| 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar | 53.807.600.000,00 | 0 | 53.807.600.000,00 |
| 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 74.856.000.000,00 | 290.014.000.000,00 | 364.870.000.000,00 |
| 16.4 Subsektor Kelautan | 63.526.400.000,00 | 190.163.000.000,00 | 253.689.400.000,00 |
| 16.5 Subsektor Kedirgantaraan | 28.423.800.000,00 | 42.067.000.000,00 | 70.490.800.000,00 |
| 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik | 98.486.200.000,00 | 22.981.000.000,00 | 121.467.200.000,00 |
| 17 SEKTOR HUKUM | 153.010.900.000,00 | 14.028.000.000,00 | 167.038.900.000,00 |
| 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional | 20.786.000.000,00 | 14.028.000.000,00 | 34.814.000.000,00 |
| 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum | 34.272.200.000,00 | 0 | 34.272.200.000,00 |
| 17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum | 97.952.700.000,00 | 0 | 97.952.700.000,00 |
| 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN | 431.233.500.000,00 | 355.577.000.000,00 | 786.810.500.000,00 |
| 18.1 Subsektor Aparatur Negara | | | |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 451.879.500.000,00 | 349.616.000.000,00 | 765.495.500.000,00 |
| 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan | 15.354.000.000,00 | 5.961.000.000,00 | 21.315.000.000,00 |
| 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA | | | |
| MASSA | 111.819.400.000,00 | 309.961.000.000,00 | 421.780.400.000,00 |
| 19.1 Subsektor Politik | 18.853.400.000,00 | 7.919.000.000,00 | 26.772.400.000,00 |
| 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri | 13.531.500.000,00 | 0 | 13.531.500.000,00 |
| 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa | 79.434.500.000,00 | 302.042.000.000,00 | 381.476.500.000,00 |
| 20 SEKTOR PETAHANAN DAN KEAMANAN | | | |
| | 1.122.793.000.000,00 | 1.000.023.700.000,00 | 2.122.816.700.000,00 |
| 20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat | 10.612.000.000,00 | 0 | 10.612.000.000,00 |
| 20.2 Subsektor ABRI | 854.127.000.000,00 | 1.000.023.700.000,00 | 1.854.150.700.000,00 |
| 20.3 Subsektor Pendukung | 258.054.000.000,00 | 0 | 258.054.000.000,00 |

PASAL II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3787